

# **FRAUD: BAGAIMANA MENDETEKSINYA?**

**Amiruddin & Sri Sundari**

## **Abstrak**

*Fraud mencakup semua kejutan, trik, kecurangan dan penyamaran, serta setiap cara yang tidak adil di mana ada pihak lainnya yang tertipu. Fraud dalam laporan keuangan biasanya berbentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja baik dalam jumlah maupun pengungkapan pos-pos dalam pelaporan keuangan untuk menyesatkan pemakai informasi laporan keuangan tersebut.*

*Kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi fraud, bergantung pula pada kecanggihan pelaku fraud, frekuensi dari manipulasi, tingkat kolusi dan ukuran senioritas yang dilibatkan. Fraud dapat terungkap, bila ada kerja sama antara beberapa pihak yang terkait dengan entitas, seperti dewan direksi, pihak manajemen, akuntan publik dan internal auditor. Adanya diskusi dengan pihak-pihak tersebut, saling memberi informasi dan memberi respon yang lebih komprehensif dan dengan adanya dokumentasi yang lengkap, salah satu cara dalam mendeteksi adanya fraud.*

*Corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan, akan membawa dampak yang positif terhadap pengurangan resiko terjadinya fraud. Dalam penerapan corporate governance harus dibarengi dengan suatu system manajemen yang efektif dan mengandung pengendalian internal yang dijalankan oleh orang-orang yang profesional dan bertanggung jawab.*

**Kata Kunci:** *fraud, pelaporan keuangan, akuntan publik.*

## **Definisi Fraud**

International Standards on Auditing (ISA) seksi 240 – The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements Paragraf 6 mendefinisikan *fraud* sebagai "... tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal". Sedangkan dalam Standar Auditing yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia – Komite Akuntan Publik (IAI- KAAP) *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan, auditor berkepentingan untuk menguji apakah suatu tindakan yang mengandung *fraud* mengakibatkan salah-saji (*misstatement*) dalam pelaporan keuangan.

Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal umumnya terkait antara lain dengan kondisi entitas secara umum, lingkungan bisnis secara umum, maupun pertimbangan hukum dan perundang-undangan.

Meskipun kecurangan atau fraud merupakan konsep hukum yang luas, kepentingan auditor (independen) berkaitan secara khusus terhadap tindakan *fraud* yang berakibat terhadap salah saji material di dalam laporan keuangan

Berdasarkan sifatnya, fraud dapat dikategorikan menjadi:

1. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan (*fundamental financial reporting*), yang timbul dari pengakuan pendapatan yang tidak tepat, lebih saji (*overstatement*) aktiva, atau kurang saji (*understatement*) kewajiban.
2. Penyelewengan aktiva (*misappropriation of assets*), termasuk penggelapan, *fraud* dalam penggajian, pencurian pihak eksternal.
3. Penyimpangan keuangan oleh manajemen
4. Kecurangan melalui penghindaran beban, misal fraud dalam pajak, mengatur pendapatan untuk menghindari pajak.
5. Pengeluaran atau timbulnya kewajiban yang tidak pada tempatnya misalnya penyuapan.

Ada beberapa factor utama yang merupakan penyebab timbulnya fraud yaitu antara lain (1) adanya kerja sama dengan pihak ketiga, (2) adanya kerja sama antara karyawan perusahaan, (3) adanya *internal control* yang kurang memadai, (4) kurangnya kesadaran terhadap perbuatan yang salah dan (5) adanya perbedaan dalam etika bisnis. Selain itu, pada umumnya juga *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*
2. Peluang untuk melakukan *fraud*
3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan *fraud*

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan atau dikatakan sebagai segitiga *fraud*.

### **Fraud Red Flags**

*Red flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, *red flags* adalah petunjuk atau indikator akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. *Red flags* tidak mutlak menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak, tetapi *red flags* ini merupakan tanda-tanda peringatan bahwa *fraud* mungkin terjadi (Hevesi, Alan G., Pattison, Mark P).

Sebagaimana dijelaskan dalam standar auditing SA seksi 316- Pertimbangan atas kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, salah saji dalam pelaporan keuangan dapat timbul dari *fraud*, yaitu pelaporan keuangan yang mengandung *fraud* dan penyalahgunaan *asset*.

Secara garis besar, terdapat tiga faktor resiko *fraud* yang berkaitan dengan *fraud* dalam pelaporan keuangan (Kenyon, Will, 2006) :

- a. Karakteristik manajemen yang berkaitan dengan kemampuan manajemen, tekanan, sikap dan perilaku terhadap pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan.
- b. Karakteristik industri yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan peraturan yang berlaku.
- c. Karakteristik operasional dan stabilitas keuangan yang meliputi sifat dan kerumitan dari transaksi perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan.

Jika dikaitkan dengan pelakunya, fraud dalam pelaporan keuangan pada umumnya dilakukan oleh manajemen, dan kondisi yang memungkinkan adanya fraud, yang harus diwaspadai diantaranya adalah:

1. Manajemen enggan menyediakan data untuk auditor eksternal.
2. Sering terjadi penggantian auditor eksternal.
3. Pengendalian intern perusahaan kurang memadai.
4. Terdapat banyak transaksi pada akhir tahun.
5. Terdapat dokumen yang hilang dan tidak dapat ditemukan.
6. Sering melakukan pergantian rekening bank.
7. Hutang yang diperpanjang terus menerus.
8. Tingkat perputaran karyawan tinggi.
9. Penjualan aktiva perusahaan di bawah harga pasar.
10. Adanya transaksi yang tidak masuk akal.

### **Fraud Laporan Keuangan**

Tujuan jangka pendek perusahaan adalah memaksimalkan laba, yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan atau menekan biaya/kewajiban. Atas dasar inilah perusahaan ingin terlihat mempunyai kinerja yang baik. Kecurigaan *fraud* atas laporan keuangan dapat dibangun dari dasar tersebut. Dengan kata lain, motif untuk melakukan *fraud* berasal dari internal perusahaan.

Menurut Ferdian & Na'im (2006), kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disaajikan berikut ini:

1. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
2. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi atau informasi lain yang signifikan.
3. Salah penerapan secara sengaja atas prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapannya.

*Fraud* dalam pelaporan keuangan biasanya juga berbentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja baik dalam jumlah maupun pengungkapan pos-pos dalam pelaporan keuangan untuk menyesatkan pemakai informasi laporan keuangan tersebut. *Fraud* laporan keuangan dapat dibedakan antara yang sifatnya inklusif dan eksklusif (Dooley dan Skalak, 2006). *Fraud* dianggap sebagai inklusif apabila laporan keuangan mengandung transaksi atau nilai yang tidak benar. Sedangkan *fraud* yang dianggap eksklusif cenderung menghilangkan transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan. *Fraud* yang inklusif lebih banyak ditemukan dalam praktik. Contoh *fraud* yang inklusif adalah *overstated* dari piutang dagang akan berdampak pada pos pendapatan.

Faktor yang membedakan antara *fraud* dan kekeliruan adalah baik faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang berakibat keterjadian salah saji di dalam laporan keuangan. Ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor independen tentang fraud dalam audit atas laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

1. Salah saji yang timbul dari *fraud* (kecurangan) di dalam laporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah satuan moneter atau pengungkapan di dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan.

2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (penyalahgunaan /penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR EKSTERNAL DALAM MENDETEKSI FRAUD**

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab profesionalnya seorang eksternal auditor dibatasi oleh standar-standar auditing yang berlaku di Indonesia, khususnya:

- # SA Seksi 110 (PSA 02) – Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen
- # SA Seksi 312 (PSA 25) – Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit
- # SA Seksi 316 (PSA 70) – Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan .
- # SA Seksi 317 (PSA 31) – Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum Oleh Klien
- # SA Seksi 333 (PSA 17) – Representasi Manajemen

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Pernyataan ini diungkapkan dalam SA Seksi 110 – Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen. Tanggung jawab auditor eksternal dalam mendeteksi fraud tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam SA Seksi 316 – Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan. Suatu kecurangan dapat berakibat pada salah saji (*misstatement*) yang bentuknya, antara lain:

- # Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan
- # Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva

Berdasarkan SA Seksi 316 tersebut, auditor eksternal harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus memperhatikan taksiran risiko ini dan mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Prosedur audit mungkin akan berubah, bila ada risiko *fraud*. Misalnya, bukti audit yang dikumpulkan mungkin lebih banyak dan bukti audit tersebut ditekankan pada bukti yang diperoleh dari sumber independen di luar perusahaan. Selain itu, pengujian mungkin lebih difokuskan pada pengujian yang dilaksanakan mendekati tanggal neraca. Semua hal tersebut dilakukan untuk menentukan dampak potensial *fraud* terhadap kewajaran laporan keuangan.

Dalam SA Seksi 317 – mengenai unsur tindakan pelanggaran hukum oleh klien, dijelaskan bahwa apabila terjadi unsur tindakan pelanggaran hukum (termasuk yang wujudnya *fraud*) maka auditor akan mengumpulkan informasi tentang sifat pelanggaran, kondisi terjadinya pelanggaran dan dampak potensialnya terhadap laporan keuangan. Terungkapnya *fraud*, yang berdampak pada denda dan kerugian, harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan . Lebih jauh lagi, *fraud* dapat memiliki dampak yang material terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sedemikian rupa sehingga auditor eksternal tidak dapat memberikan pendapat “wajar tanpa pengecualian”.

Auditor perlu meminta pernyataan dari manajemen akan informasi tentang kecurangan yang berdampak material atas laporan keuangan . Bahkan idealnya,

seperti yang diatur dalam standar auditing USA yaitu AU Section 333, *Management Representations*, terdapat pernyataan manajemen bahwa manajemen bertanggung jawab atas desain dan implementasi program dan pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*.

Perlu ditekankan bahwa walaupun auditor bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan auditnya guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, termasuk salah saji yang timbul dari *fraud*, namun karena tingginya tingkat kompleksitas *fraud*, auditor eksternal tidak dapat diharapkan untuk memberikan jaminan mutlak bahwa salah saji karena *fraud* tersebut akan terdeteksi, sebagaimana disebutkan dalam SA Seksi 110.

Ada beberapa keterbatasan auditor eksternal dalam mendeteksi salah saji yang timbul dari *fraud*. *Audit* dan *review* yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penentuan apakah suatu laporan keuangan telah disajikan secara wajar pada umumnya dilakukan melalui pengujian (*testing*) terhadap sejumlah sampel dan bukan pengujian terhadap keseluruhan populasi. Dengan pengujian secara sampling, maka tidak dapat dihindari risiko adanya salah saji yang tidak terdeteksi, salah satunya karena penggunaan *sampling risks*.

Kemampuan auditor eksternal dalam mendeteksi *fraud*, bergantung pula pada kecanggihan pelaku *fraud*, frekuensi dari manipulasi, tingkat kolusi dan ukuran senioritas yang dilibatkan, karena semakin tinggi tingkat kolusi dalam *fraud* dan semakin tinggi tingkat manajemen yang terlibat dalam *fraud* ini, semakin sulit pula untuk mendeteksi *fraud* tersebut oleh auditor eksternal.

Masyarakat sangat mengharapkan sekali kepada auditor untuk mengungkapkan adanya *fraud* dalam laporan keuangan suatu perusahaan, namun auditor pun memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan *fraud*. Dengan demikian, terjadi kesenjangan atau *expectation gap* antara masyarakat yang berharap agar auditor dapat mengungkapkan semua *fraud* yang terjadi dalam laporan keuangan dan kenyataan bahwa auditor memiliki keterbatasan dalam mendeteksi *fraud*.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam perusahaan agar tingkat kemungkinan dideteksinya *fraud* lebih besar, yaitu:

1. Adanya diskusi antar anggota tim audit tentang kemungkinan risiko *fraud* sekarang menjadi wajib.
2. Semua pihak agar mengidentifikasi *fraud*.
3. Adanya respon yang lebih komprehensif dan terintegrasi terhadap risiko *fraud*.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor dalam mendeteksi *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana auditor dapat berkomunikasi dengan efektif sehingga pihak klien lebih termotivasi untuk menyumbangkan informasi tentang *fraud*. Dengan perkataan lain, diskusi ini merupakan langkah awal bagaimana auditor mendapatkan informasi mengenai *fraud*.
2. Auditor menerapkan unsur *unpredictability* (tidak dapat ditebak) dalam prosedur auditnya, misalnya mengacak sifat, jadwal dan sampel pengujiannya.

3. Auditor perlu mengasah sensitivitasnya akan hal-hal yang sifatnya tidak lazim yang boleh jadi merupakan indikasi akan terjadinya *fraud*. Misalnya memeriksa manual *journal entry*, auditor melihat adanya angka yang secara ganjil jumlahnya bulat; sewaktu dicek lebih lanjut ternyata benar bahwa angka tersebut merupakan angka yang dimarkup dengan cara dibulatkan ke atas.
4. Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor perlu menerapkan praktik - praktik manajemen risiko secara lebih baik. Sebagai contoh, auditor akan melakukan penilaian, berdasarkan kriteria tertentu, atas hal-hal sebagai berikut: (1) apakah auditor dapat menerima suatu entitas sebagai kliennya, (2) apakah auditor dapat melanjutkan hubungan profesional dengan kliennya dari satu periode ke periode berikutnya, (3) apakah auditor dapat menerima suatu penugasan tertentu dari kliennya. Dengan perkataan lain, bila auditor meragukan integritas dari manajemen suatu entitas, atau berdasarkan pengalaman entitas tersebut rentan terhadap *fraud*, maka auditor dapat memutuskan untuk secara profesional tidak menerima entitas tersebut sebagai kliennya.

*Fraud* dapat dideteksi bukan hanya melalui proses audit oleh akuntan publik saja tetapi secara lebih komprehensif melalui *fraud deterrence cycle* yang melibatkan manajemen, internal auditor, auditor eksternal dan auditor forensik. Analisis atas *corporate reporting value chain* mendukung pandangan bahwa auditor hanyalah salah satu bagian dalam mata rantai pelaporan perusahaan (termasuk pelaporan keuangan) dan pencegahan dan pendeteksian *fraud* akan membutuhkan kerja sama dari para partisipan atau bagian-bagian lain dari mata rantai ini.

Pihak-pihak yang ikut menanggung beban dalam mendeteksi adanya *fraud* ini mencakup, manajemen, dewan direksi, penyusun standar, dan regulator, yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam penegakan *corporate governance* dan masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri dalam memastikan bahwa pasar finansial investor dan pemakai laporan keuangan lainnya terpenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain pihak-pihak tersebut bersama pihak lainnya merupakan *corporate reporting supply chain*.

Berdasarkan konsep tersebut, auditor hanyalah salah satu bagian saja yang terkait dalam mendeteksi adanya *fraud* dalam laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan relevan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Komite audit harus tanggap dan bersikap transparan terhadap kepada auditor terutama untuk hal-hal yang bersifat rentan terhadap *fraud*. Dengan transparansi dan komunikasi yang efektif dengan pihak auditor beban yang mereka tanggung, termasuk beban risiko terjadinya *fraud*, terasa berkurang.

*Corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan, akan membawa dampak yang positif terhadap pengurangan risiko terjadinya *fraud*. Dalam penerapannya (*corporate governance*) harus dibarengi dengan suatu sistem manajemen yang efektif dan mengandung pengendalian internal yang dijalankan oleh orang-orang yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan perkataan lain *corporate governance* yang dapat mengurangi terjadinya *fraud*, diterapkan jika melibatkan berbagai pihak, baik manajemen, pemegang saham, karyawan, pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan perusahaan tersebut. Pencegahan dan

pendeteksian *fraud* melalui penerapan *corporate governance* mungkin sulit, namun akan lebih sulit jika tidak mencoba untuk berubah dan menjadi lebih baik.

Pendeteksian kecurangan bukan merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Terjadinya kecurangan atau *fraud* sebenarnya berbeda dengan kekeliruan. Menurut Loebbecke et al. (1989), kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian (*concealment*). Penyembunyian tersebut terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Jika auditor meminta bukti transaksi yang mengandung kecurangan, pelaku kecurangan akan memberi informasi palsu atau informasi yang tidak lengkap.

Johnson et al. (1991) menyebutkan ada tiga taktik yang digunakan manajer untuk mengelabui auditor. Taktik pertama adalah membuat deskripsi yang menyesatkan (seperti mengatakan perusahaan yang sedang mengalami penurunan), agar menyebabkan auditor menghasilkan ekspektasi yang tidak benar sehingga gagal mengenali ketidakkonsistenan. Taktik kedua, adalah menciptakan bingkai (*frame*) sehingga menimbulkan hipotesis tidak adanya ketidakkonsistenan untuk evaluasi ketidakkonsistenan yang terdeteksi. Taktik ketiga, yaitu menghindari untuk memperlihatkan ketidakpantasan dengan membuat serangkaian manipulasi kecil (secara individu tidak material) atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan sehingga membentuk rasionalisasi atas jumlah saldo yang dihasilkan. Dengan ketiga taktik ini, manajemen klien akan berhasil bila auditor menggunakan cara sederhana melalui representasi tunggal dalam menginterpretasikan ketidakkonsistenan yang terdeteksi.

Hasil penelitian Jamal et al. (1995) menunjukkan bahwa sebagian besar auditor (dalam penelitian ini menggunakan partner) tidak mampu mendeteksi kecurangan atau *fraud* dengan baik. Walaupun motivasi, pelatihan dan pengalamannya memadai, para partner yang diuji dapat dikelabui oleh *frame* dari manajemen klien.

Ketidakmampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan atau *fraud* ini ada hubungannya dengan keahlian yang dibentuk oleh pengalaman yang relevan dengan kecurangan. Kecurangan atau *fraud* itu sendiri frekuensi terjadinya jarang dan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya kecurangan, sehingga pengalaman auditor yang berkaitan dengan kecurangan atau *fraud* tidak banyak.

## **Simpulan**

*Fraud* merupakan problem yang serius, maka akuntan publik harus mengambil langkah-langkah komprehensif dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan tersebut. Pemahaman tentang *fraud* sangat penting, agar lebih dini bisa dilakukan pencegahan.

Langkah awal dalam mendeteksi *fraud* adalah berasal dari informasi atau petunjuk dari berbagai pihak seperti karyawan, rekanan dan konsumen. Selain itu, mendeteksi *fraud* atau kecurangan tentunya dengan adanya pengendalian internal yang diimplementasikan dalam organisasi (entitas), namun semua pihak bertanggung jawab dalam mendeteksi adanya *fraud* dalam entitas tersebut, apakah dia seorang dewan komisaris, internal auditor, eksternal auditor, pihak manajemen dan karyawan sekalipun.

Tanggung jawab profesi akuntan umumnya dan akuntan publik khususnya sebagai *the last regiments standing* di dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif di Indonesia yang menganut pilar-pilar *good corporate governance* seperti kejujuran, transparansi dan tanggung jawab serta adanya akuntabilitas akan semakin berat. Selain itu, dalam profesi akuntan publik, sikap mental yang jujur, independen dan skeptik secara professional lebih ditekankan di dalam kode etik profesi akuntan publik.

Akuntan publik bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

AICPA. "Auditors' Responsibility for Fraud Detection". *Journal of Accountancy Online*. (www. Aicpa.org/PUBS/JOFA/jan2003/ramos.htm.)

Apostolou, Nicholas G., dkk. 1990. "*Forensic Investing: Red Flags*". ([http:// www. Bus. Isu. Edu/accounting/faculty/napostolou/forensic.html](http://www.Bus.Isu.Edu/accounting/faculty/napostolou/forensic.html))

Alvin A. Arens, Randal J. Elder & Mark S. Beasley, *Auditing and Assurance Services an Integrated Approach*, International Edition, 2003.

Dooley, Daniel V. dan Skalak, S. L. Skalak. "Financial Reporting Fraud and The Capital Markets". *A Guide to Forensic Accounting Investigation*. 2006.

Hevesi, Alan G. dan Pattison, M. P. "*Red Flags for Fraud*". State of New York Office of The State Comptroller, 2001.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "*Standar Profesional Akuntan Publik*". Jakarta: Salemba Empat.

International Standards on Auditing ("ISA") seksi 240 "*The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements*".

Kenyon, Will, dkk. "Potential Red Flags and Fraud Detection Techniques". *A Guide to Forensic Accounting Investigation*. 2006.